

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut Indonesia mencapai kira-kira 5,8 juta km², sayangnya pemanfaatannya baru kurang lebih 59% dari total potensi sumber daya perikanan atau laut Indonesia (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2011). Lautan ini, menyimpan potensi yang sangat besar di dalamnya, sumber daya hayati dan non hayati (Ghalidza, 2020). Komoditas perikanan sangat banyak diminati oleh banyak negara-negara maju dan merupakan komoditas ekspor yang unggul. Keanekaragaman hayati laut memiliki negara maju, makmur dan mandiri (Mahyudin, 2008).

Dalam forum *World Ocean Summit/WOS* (2017), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengakui sektor kemaritiman merupakan sektor penting perekonomian nasional memberikan sumbangan produk domestik bruto sampai 20 persen/tahun.. Selain itu, sektor kemaritiman, termasuk kelautan dan perikanan di dalamnya, bisa menyerap tenaga kerja hingga 11,38 (Ambari, 2017).

Sangat disayangkan asset yang berharga ini jika tidak dimaksimalkan. Kekayaan yang ada jika dimanfaatkan dengan baik maka akan melahirkan potensi baru dalam pertumbuhan ekonomi negara. Kelautan masih sangat diminati oleh negara-negara di dunia (Ghalidza, 2020). Sebagai sumberdaya yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi baik nasional dan daerah, proses pembangunan perikanan dan kelautan harus lebih mampu berperan dan berdaya guna. Pembangunan sumberdaya perikanan dan

kelautan yang dimaksud tidak hanya bagi peningkatan hasil secara kuantitas, tetapi secara kualitas yang berarti meningkatkan serta menghasilkan nilai tambah komoditas dari perikanan dan kelautan (Banu, 2020).

Peran pemerintah dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas kegiatan sektor perikanan sangat diperlukan sehingga kemajuannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas pada sektor perikanan harus mempertimbangkan konsep keberlanjutan, agar kelestarian laut tetap terjaga dan menghentikan tindakan eksploitasi kekayaan laut yang orientasinya hanya memenuhi kuantitas permintaan pasar tanpa memikirkan kelestarian.

Kegiatan dikatakan berkelanjutan jika kegiatan pembangunan berkelanjutan secara politik, ekonomi, ekologi dan sosial. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi; Berkelanjutan secara ekologis berarti bahwa pembangunan bisa menjaga ekosistem, daya dukung lingkungan, dan sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati. Sedangkan pembangunan sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan mampu menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial dan pengembangan kelembagaan (Ananda, 2016).

Upaya dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, pemerintah telah menerapkan konsep *blue economy*. Konsep tersebut mengedepankan laut sebagai sumber daya utamanya dan diharapkan mampu membantu perekonomian nelayan.

Dimana pada saat ini penduduk pesisir kurang diperhatikan dalam pembangunan ekonomi yang tercermin dari masih rendahnya tingkat harapan hidup masyarakat pesisir. Diperlukan gagasan yang bijak untuk mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di laut Indonesia agar kedepannya tercipta pembangunan yang tepat sasaran dan tentunya berkelanjutan (Ramadhan & Hakim, 2019).

Blue economy adalah konsep optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin kelangsungan usaha dan kelestarian lingkungan. Pada dasarnya, *blue economy* merupakan paradigma pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip ekosistem (Sharif dkk, 2012). Ekonomi biru dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang berlandaskan pada pembangunan ekonomi kerakyatan secara menyeluruh untuk mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh. Pendekatan pembangunan berbasis *blue economy* akan bersinergi dengan penerapan strategi tiga arah: pro-poor (penurunan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro-bisnis (penyerapan tenaga kerja) dan pro-lingkungan (proteksi terhadap lingkungan). Program (Yusuf, 2012). Salah satu indikator tercapainya *blue economy* adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera, yaitu mampu memenuhi kebutuhannya mulai dari sandang, pangan, dan papan, serta meningkatkan pendapatan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat selama menjalankan kegiatannya (Seperly, 2020). Konsep yang baru muncul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, masih menjadi satu hal yang sulit untuk diterapkan bagi Indonesia mengingat adanya kesenjangan sosial di Indonesia yang cukup tinggi. Memang sudah ada industri di Indonesia yang

menerapkannya, tapi masih belum banyak jika dibandingkan dengan negara lain. *Blue economy* memiliki manfaat di antaranya adalah : 1) menghasilkan sedikit limbah ke lingkungan, 2) meminimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan sehingga lebih efisien, dan 3) mengolah limbah menjadi bahan baku. Oleh karena itu *blue economy* perlu diterapkan, namun sampai saat ini untuk menerapkannya perlu pemahaman tentang pentingnya *blue economy* untuk *blue sky – blue ocean* (Chandra, 2021).

Forum kerjasama ekonomi terbuka Asian Pasifik yaitu *Asian Pasific Economic Cooperation* (APEC) didirikan di Canberra, Australia pada November 1989 sebagai upaya untuk memajukan segala aspek kegiatan ekonomi di Asia Pasifik. Dengan 21 negara anggota antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang dan Korea Selatan. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah berkomitmen untuk menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model *blue economy* yang ditujukan sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan. Kesempatan ini dijadikan salah satu kegiatan guna mewujudkan kerjasama kemitraan antar anggota APEC dengan pelaksanaan ekonomi dengan model *blue economy*. Beberapa negara APEC yang telah menerapkan *blue economy* adalah Amerika Serikat, Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Mexico.

Asian Pasific Economic Cooperation (APEC) mendefinisikan *blue economy* sebagai model ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable*). Model ekonomi yang mendorong industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan mendorong inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Asia Pasifik merupakan daerah penghasil ikan terbesar dan menjadi rumah bagi terumbu karang terbesar di dunia (Indonesia memiliki luas terumbu karang mencapai 50.875 km²). APEC mempunyai kesepakatan terkait *blue economy* adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, perlindungan terhadap sumber daya laut, pengelolaan laut untuk ketahanan pangan, tidak melakukan perdagangan bebas atau dilakukan secara terbuka (memerangi penangkapan dan perdagangan ikan ilegal), meningkatkan pengelolaan keberlanjutan ekosistem laut, dan meningkatkan perdagangan hasil laut. Setiap anggota APEC didorong untuk mengembangkan kebijakan dan dukungan kelembagaan dalam pengelolaan berbasis ekosistem, penggunaan ekonomi secara intensif, dan perangkat berbasis pasar.

Indonesia sebagai kepulauan terbesar didunia berpeluang untuk berkontribusi dalam kebijakan dan implementasi *blue economy* terutama di sektor industri perikanan. Penerapan *blue economy* ini sendiri sudah dimulai di Indonesia sejak pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dilandasi kondisi geografis Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang yaitu 95.181 km² (Kementerian Kelautan dan Perikanan), sehingga pemerintah memikirkan bagaimana cara melestarikan sumber daya laut yang bisa diandalkan sebagai sumber pangan

masyarakat.

Semakin berkembangnya pembangunan di Indonesia, telah dihadapkan dengan situasi internasional seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang tujuan dibentuknya adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dikawasan ASEAN. Hal ini juga memiliki tantangan yang muncul : (1) tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang tinggi, (2) adanya kerusakan dan eksploitasi sumber daya laut, (3) norma dan nilai-nilai budaya lokal yang memudar, (4) rendahnya integritas dan kemandirian organisasi sosial diwilayah pesisir, (5) minimnya sarana infrastruktur dan unit kesehatan di lingkungan pemukiman yang keterbelakang. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat diajarkan dan di ajak untuk menanggulangi *exploitation risk* yang selama ini menjadi masalah, hal ini menunjukkan sebagaimana sumber daya alam harus dijaga dan digunakan secara efektif karena apabila hasil laut dieksploitasi secara berlebihan akan menyebabkan *over fishing* sehingga menyebabkan kerugian bagi nelayan itu sendiri. Apabila terus menerus terjadi hal seperti ini perlu ditekankannya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sektor kemaritiman dapat memicu keberhasilan MEA.

Nelayan menggantungkan hidupnya dari sumberdaya laut dan pantai yang tergantung pada musim. Adanya keterbatasan modal, skill, sistem bagi hasil perikanan dan perdagangan atau pelelangan ikan yang belum transparan, serta budaya kerja yang masih bersifat konvensional (Retnowati, 2011). Usaha nelayan yang bersifat musiman dan bergantung pada keadaan alam menyebabkan nelayan tidak mendapatkan pendapatan yang tidak tepat dan menghadapi kesulitan dalam ekonomi.

Perubahan iklim ini menyebabkan bertambahnya biaya melaut, resiko melaut, kurang efektifnya alat tangkap dan sulitnya menentukan wilayah tangkap (Dewiyanti, Ma'ruf & Indriyani, 2019; Patriana & Satria, 2013).

Pantai Depok merupakan objek wisata yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bulan September – November 2013 koordinat luas pantai Depok (49M) 0421692 – 9114168 (Yan & Srijono, 2013). Pantai ini terkenal akan pasar ikan yang merupakan hasil tangkap nelayan di pantai tersebut. Pasar pelelangan di pantai ini menjadi daya tarik lantaran ikan-ikan yang masih sangat fresh karena nelayan selalu membawa hasil tangkapan ikan yang baru saja ditangkap. Pasar ikan disini menjadi daya tarik para konsumen karena para penjualnya yang sangat ramah. Selain pasar ikan yang menarik, terdapat objek wisata pantai yang sangat indah bagi para wisatawan. Kabupaten Bantul memiliki panjang garis pantai mencapai 17 km. potensi perikanan di Pantai Depok tidak di dukung kondisi geografi Pantai Selatan, sehingga pemanfaatan sumberdaya pesisir belum optimal.

Pada Konferensi Perubahan Iklim 2021, Indonesia dan Swedia sepakat sebagai negara kepulauan untuk sama-sama menerapkan *blue economy*. Dalam pemulihan dari pandemi Covid-19 *blue economy* berpotensi digunakan. Untuk tranformasi ekonomi demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, *blue economy* adalah salah satu kunci yang perlu dioptimalkan. Sistem ini sudah berlaku di Indonesia sejaak pengesahan Pernyataan Bersama oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan

Menteri Infrastruktur Swedia Thomas Eneroth dan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim/Deputi Perdana Menteri Swedia Per Bolund di Stockholm. Swedia sudah mengembangkan strategi *blue economy* melalui *Strategi Blue-Growth* dan *Marine Spatial Planning*.

Kerangka pembangunan *blue economy* diarahkan untuk mengoptimalkan keanekaragaman sumberdaya laut yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sumberdaya laut. Pengelolaan sumberdaya laut dan ekosistem laut diarahkan untuk bisa mengatasi tantangan degradasi pesisir, perubahan iklim, dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai. *Blue economy* merupakan model baru yang menciptakan inovasi dan kreativitas baru.

Pengembangan Indonesia menuju negara maritim yang tangguh memiliki prospek yang sangat besar untuk diwujudkan. Besarnya potensi kelautan yang dimiliki Indonesia saat ini menjadi modal penting dalam perwujudan cita-cita tersebut. Tantangan yang muncul adalah perlu penyiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola berbagai potensi kelautan yang ada. Konsep *blue economy* merupakan salah satu langkah strategis yang mengarahkan pada SDM yang berkualitas dan berkarakter untuk kebutuhan pencapaian tujuan Indonesia menjadi negara maritim.

Tantangan Indonesia dalam mengembangkan *blue economy* adalah sektor perikanan tangkap diketahui bahwa sumber daya ikan makin menipis akibat *overfishing*. Jika hal ini berlanjut maka pasokan ikan dari industri ini akan semakin berkurang. Untuk sektor industri kimia berbasis laut memiliki beberapa tantangan diantaranya: a) industri didominasi oleh UMKM; b) daya tampung unit pengolahan

pangan berbasis laut pada umumnya masih rendah; c) kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis sumber daya manusia terhadap standar produksi, serta rendahnya jaminan kualitas produk dan bahan baku; d) resiko pasokan bahan baku yang tidak berkelanjutan; dan e) perubahan dinamis dalam preferensi konsumen. Untuk menjalankan strategi *blue economy* di Indonesia terdapat strategi dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya laut, mobilisasi insentif dan investasi (pengelolaan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah untuk lingkungan yang berkualitas jauh dari kerusakan), sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data sumberdaya laut (pengelolaan perikanan, ekosistem, *green economy*, dan dampak dari kegiatan masyarakat), membangun sistem pengelolaan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan. Bank Dunia juga mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan strategi *blue economy* melalui berbagai jenis investasi, seperti : Program Laut Sejahtera, investasi untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir dan memulihkan ekosistem kritis, program rehabilitas dan pengelolaan terumbu karang, dan program pembangunan pariwisata terintegritas dan berkelanjutan.

Beberapa studi pernah dilakukan untuk mengkaji tentang indikator penerapan dan implementasi *blue economy*. Berdasarkan studi terdahulu diketahui bahwa indikator tersebut meliputi implementasi (Nurhayati, 2019; Sari & Muslimah, 2020; Rani & Cahyasari, 2015), sumber daya manusia (Prayuda & Sary, 2019), efisien sumber daya alam (Ghalidza, 2020), perekonomian (Ilma, 2014). Dilihat dari hasil studi terdahulu menunjukkan aspek *blue economy* dalam penerapan yang dilakukan.

Berdasarkan fenomena dan pada tabel research gap, bahwa semua indikator sangat beragam dalam implementasi *blue economy*.

B. Rumusan Masalah

Nelayan bergantung pada laut untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan oleh karena itu pendekatan pemanfaatan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Ini yang menjadi pertimbangan Pemerintah untuk mendorong *blue economy* diterapkan dan sebagai cara yang tepat untuk menjaga segala potensi kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana **“Analisis Implementasi Konsep Blue Economy di Pesisir Pantai Depok Bantul”**

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat perisisir Bantul mengenai konsep *blue economy* pesisir pantai Depok Desa Kretek Bantul ?
- b. Bagaimanakah implementasi *blue economy* di pesisir pantai Depok Desa Kretek Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat perisisir Bantul mengenai konsep *blue economy* pesisir pantai Depok Desa Kretek Bantul?
- b. Untuk mengetahui implementasi *blue economy* pesisir pantai Depok Desa Kretek Bantul?

D. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dilakukan pada nelayan pesisir pantai Depok Bantul.

Ruang lingkup analisis dan pembahasan dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian terkait *blue economy* di bidang perikanan. Sektor perikanan sangat menarik untuk dikaji karena dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang perikanan dan kelautan.

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian sejenis, serta dapat membuka wawasan baru dan menambah pengetahuan yang sudah ada bagi pembaca, sehingga dapat memicu munculnya penelitian selanjutnya khususnya mengenai penerapan konsep *blue economy* yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya serta pelestarian lingkungan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai cara pengelolaan sumber daya secara optimal yang menguntungkan namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat, khususnya untuk pembangunandaerah dengan kaitannya dalam pelestarian lingkungan dan optimalisasi sumber daya pada masyarakat pesisir.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan maupun bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penerapan *blue economy*, terutama untuk meningkatkan jumlah produksi dan efisiensi usaha perikanan.